

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

**KEMENTERIAN
PERTANIAN**

TAHUN 2020 - 2024



Kementerian Pertanian
REPUBLIK INDONESIA



Visi

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025

Misi

1. Mewujudkan birokrasi/manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, *capable*, akuntabel, transparan, demokratis, dan bebas KKN;
2. Meningkatkan integritas birokrasi pemerintah;
3. Mewujudkan pelayanan prima dan berkeadilan

Tujuan

Meningkatkan profesionalisme & integritas birokrasi pemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya organisasi, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan praktek KKN, penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja & pengawasan birokrasi yang semakin melibatkan partisipasi masyarakat

Sasaran:

Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, & terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah :

- (1) landasan hukum & regulasi;
- (2) organisasi;
- (3) tatalaksana;
- (4) manajemen sumber daya manusia aparatur;
- (5) pola pikir (*mind-set*), budaya organisasi (*culture-set*) & nilai dasar aparatur;
- (6) integritas aparatur;
- (7) sistem pengawasan intern & akuntabilitas kinerja;
- (8) kualitas pelayanan publik; &
- (9) sistem monitoring & evaluasi kinerja, & pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.

PEMERINTAH KELAS DUNIA



Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

**SASARAN LIMA
TAHUN PERTAMA
(2010 – 2014)**



Implementasi hasil - hasil yang sudah dicapai oada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum di capai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah

**SASARAN LIMA
TAHUN KEDUA
(2015 – 2019)**

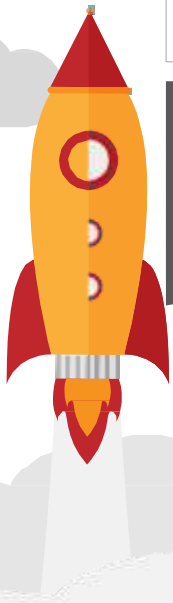


Peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia

**SASARAN LIMA
TAHUN KETIGA
(2020 – 2024)**



KEMANTAN



VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG



MISI

- Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
- Mencapai lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;**
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

KEBIJAKAN NASIONAL

5 (LIMA) PERIORITAS KERJA PRESIDEN DAN WAKIL BUTIR
4 FOKUS PADA REFORMASI BIROKRASI



1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur; Interkoneksi kawasan Industri kecil, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan;



2. Pembangunan Sumberdaya Manusia; Menjamin Kesehatan terutama ibu hamil dan anak usia sekolah serta meningkatkan Pendidikan dan Manajemen Talenta



3. Undang Investasi seluas luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan; Memangkas Hambatan Investasi;



4. Reformasi Birokrasi; Kecepatan Melayani dan memberi izin. Menghapus pola pikir linier, monoton dan hidup di zona nyaman. Prilaku Adaptif, produktif, inovasi dan Kompetitif.



5. APBN yang fokus dan Tepat Sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL YANG DIHARAPKAN KEDEPAN



IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TINGKAT MAKRO

MAKRO

Program-program

- 1) Penataan Organisasi;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 4) Penataan Pengawasan Intern;
- 5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan.

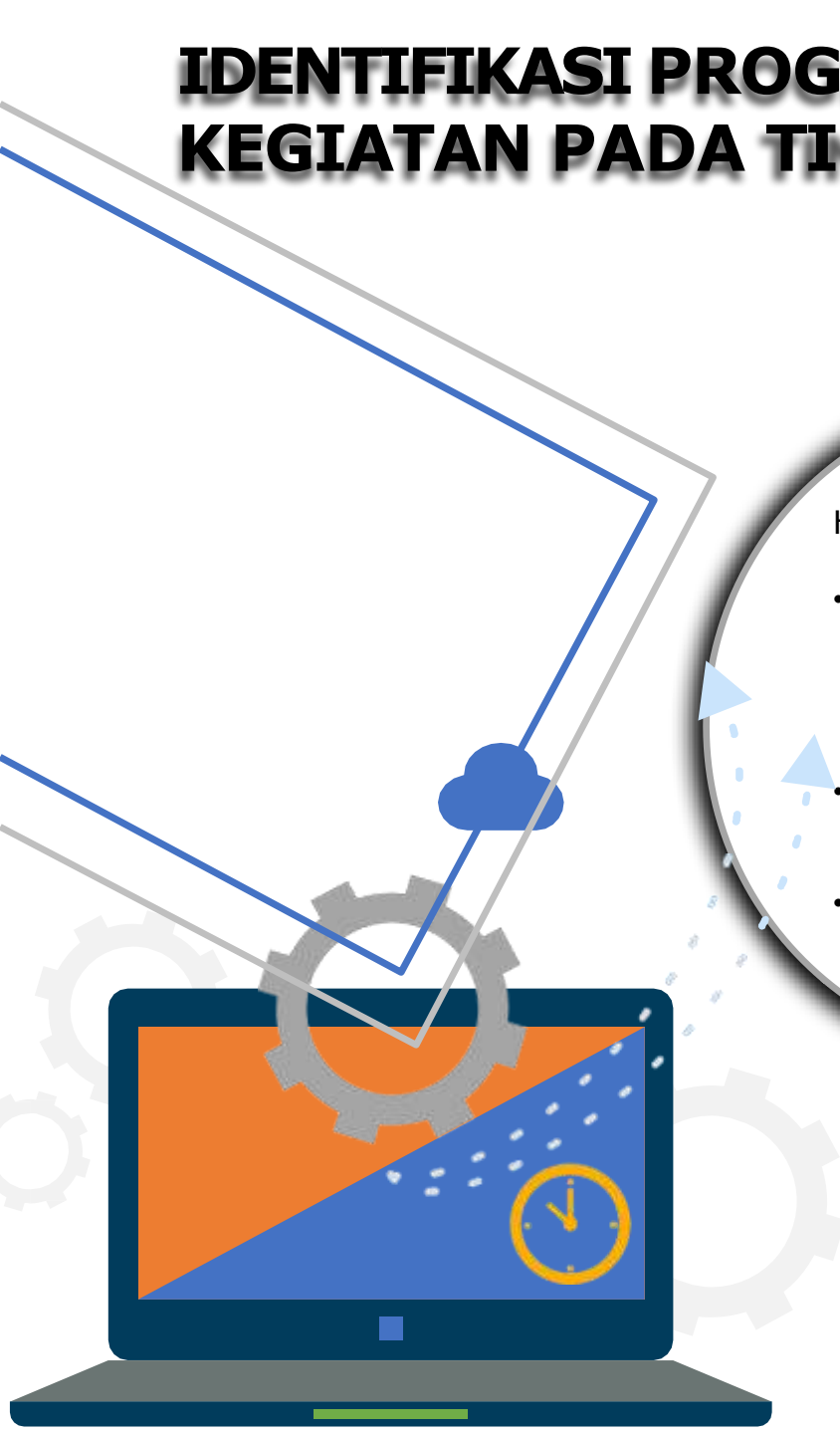
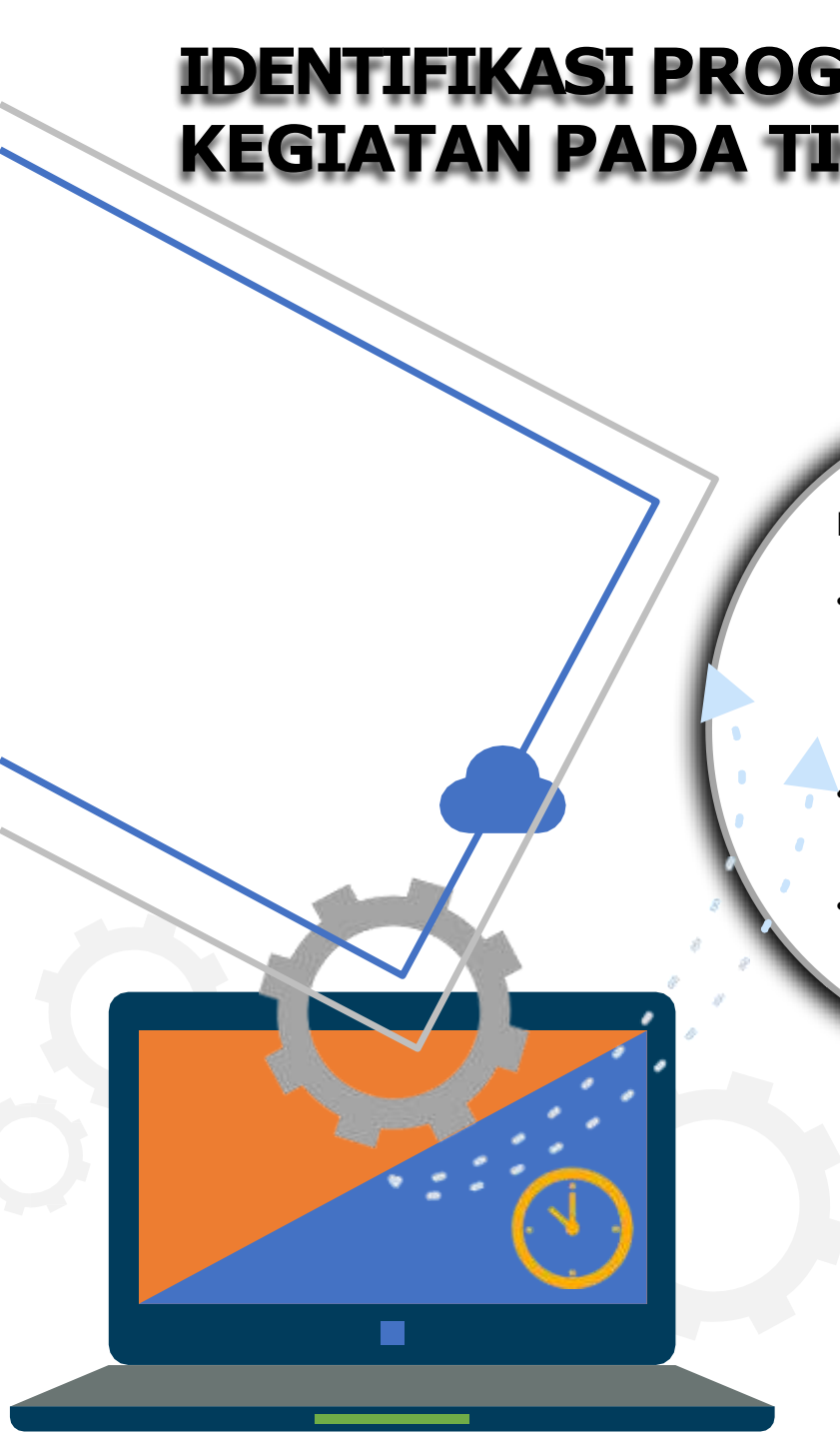


Hasil yang diharapkan, antara lain:

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan
- Peningkatan kinerja birokrasi
- Penurunan penyalahgunaan wewenang/tingkat penyimpangan
- Perwujudan perubahan *mind-set* dan *culture-set*
- Peningkatan integritas birokrasi
- Peningkatan profesionalisme birokrasi
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pegawai
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

MIKRO

IDENTIFIKASI PROG KEGIATAN PADA TI



IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TINGKATAN MIKRO

Program-program:

- 1) *Quick Win*;
- 2) Manajemen Perubahan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksanaan;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Penataan Pengawasan Internal;
- 8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

MIKRO

Hasil yang diharapkan, antara lain:

- Peningkatan kepercayaan masyarakat
- Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi
- Efektivitas dan Efisiensi organisasi
- Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan SDM aparatur
- Peningkatan profesionalisme SDM aparatur
- Peningkatan kesejahteraan aparatur
- Peningkatan kualitas pelayanan
- Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan kebijakan
- Peningkatan kinerja
- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Peningkatan kapabilitas



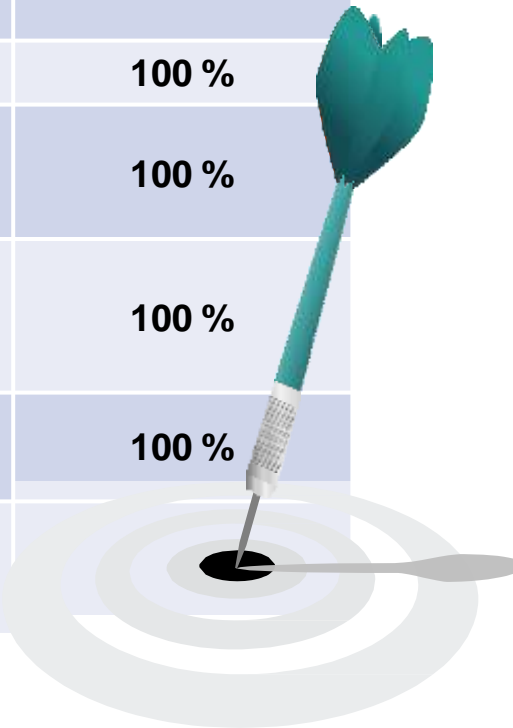
**DELAPAN AREA
PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI**





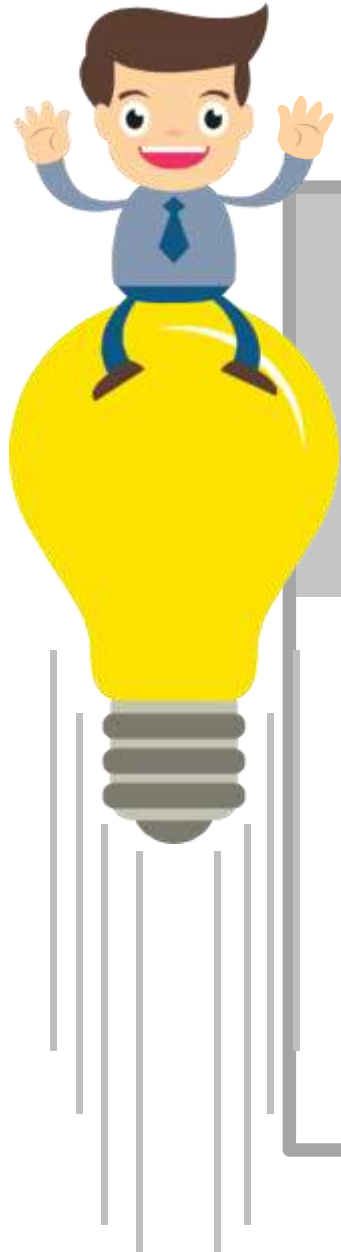
SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran	Indikator		Base Line (2020)	Target (2024)
BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL	1. INDEK PRILAKU ANTI KORUPSI MINIMAL BAIK		na	100 %
	2. PERDIKAT SAKIP MINIMAL B		96,40 %	100%
			94 %	100 %
	3. OPINI BPK (WTP)			
BIROKRASI YANG KAPABEL	1. INDEK KELEMBAGAAN BAIK		na	100 %
	2. INDEK SPBE MINIMAL BAIK		74 %	100 %
	3. INDEK PROFESIONAL ASN		65,7 %	100 %
BIROKRASI MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS	INDEK PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK		59,52 %	100 %



PERBANDINGAN PROGRAM ANTAR TINGKATAN PELAKSANAAN

PROGRAM UNTUK TINGKAT



- 1) Penataan Organisasi;
- 2) Penataan Tata Laksana;
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 4) Penataan Pengawasan;
- 5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

MAKRO



- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Konsultasi dan Asistensi;
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 4) *Knowledge management.*

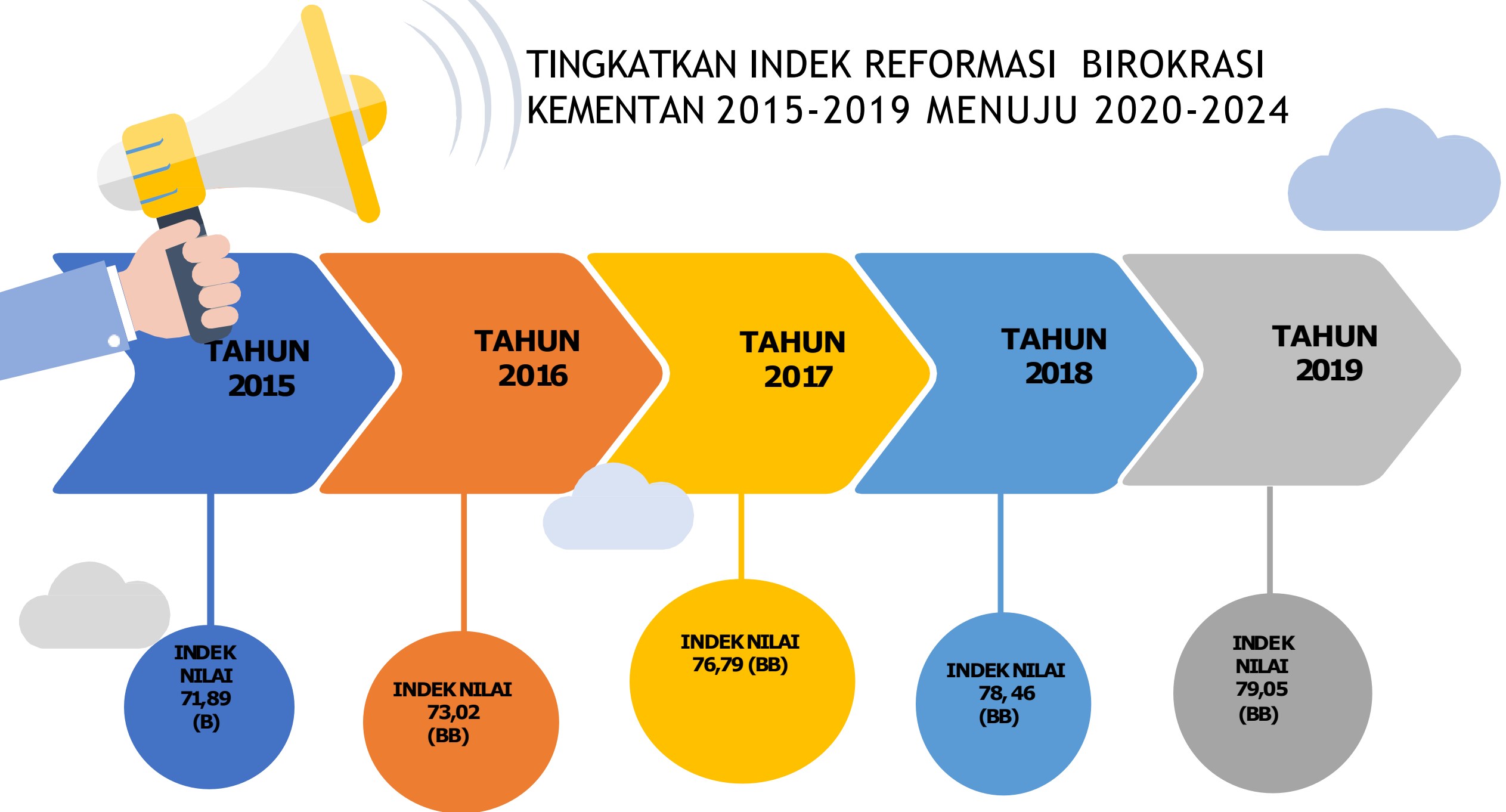
MESO



- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tata laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penguatan Pengawasan;
- 7) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

MIKRO

TINGKATKAN INDEK REFORMASI BIROKRASI KEMANTAN 2015-2019 MENUJU 2020-2024





OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERAN



PERISTIWA

PERTAHANKAN DAN PERBANYAK HASIL PRESTASI REFORM KEMENTERIAN PERTANIAN



Raih Penghargaan Peringkat Satu

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kluster Tertinggi "Informatif"

dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia

Rabu, 25 November 2020



Terima Anugerah Gatra Awards 2020

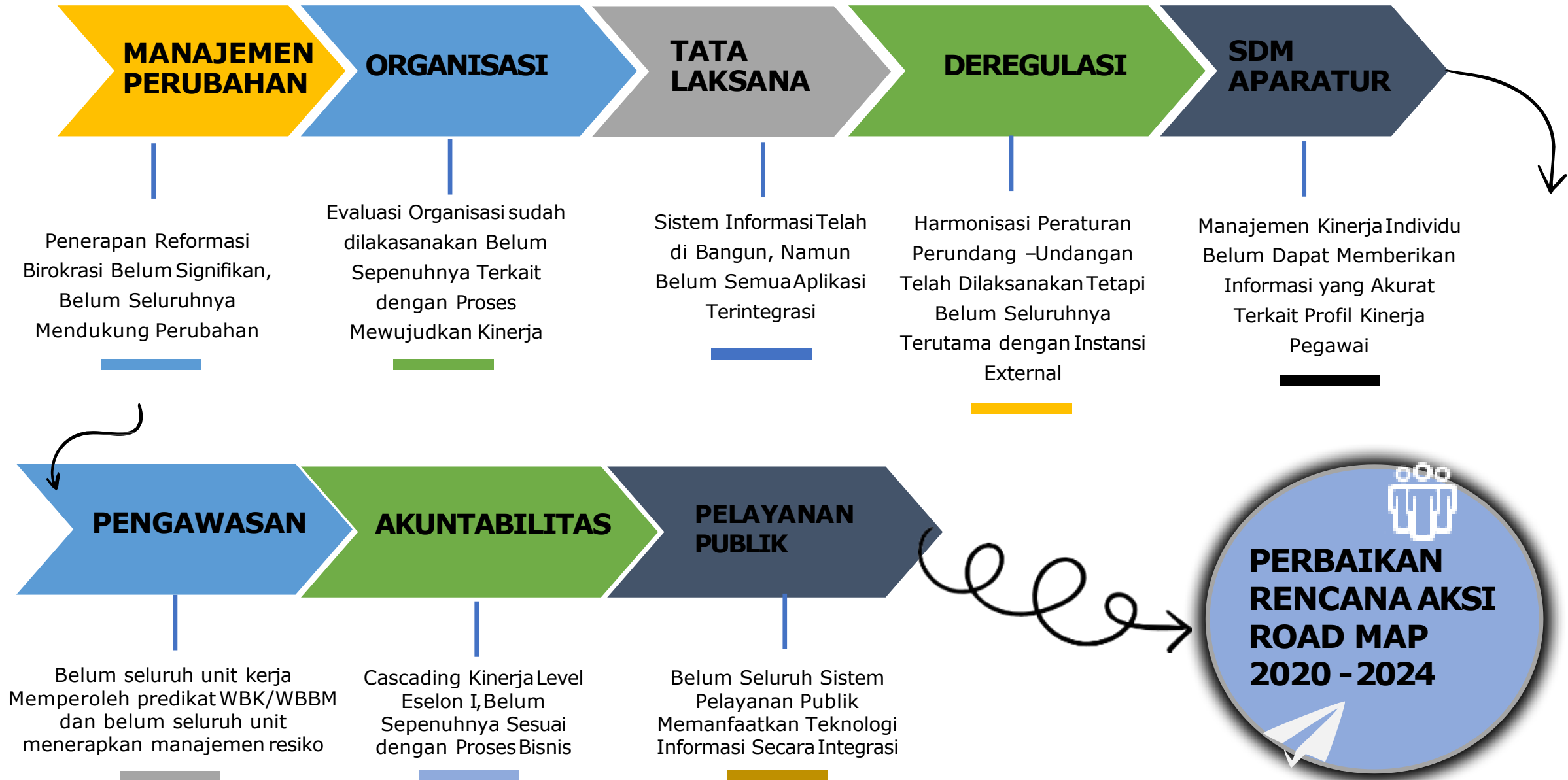
Menteri Pertanian (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo menerima penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020. Mentan mendapat apresiasi besar sebagai menteri yang mampu mendorong ketahanan serta ekspor pangan selama pandemi Covid-19. Dalam sambutan serata

Virtually, Mentan Syahrul menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Gatra terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) selama setahun terakhir. Dia berharap, penghargaan Gatra Awards mampu menjadi modal dan semangat besar untuk bekerja lebih keras lagi. (*)



Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik 2019

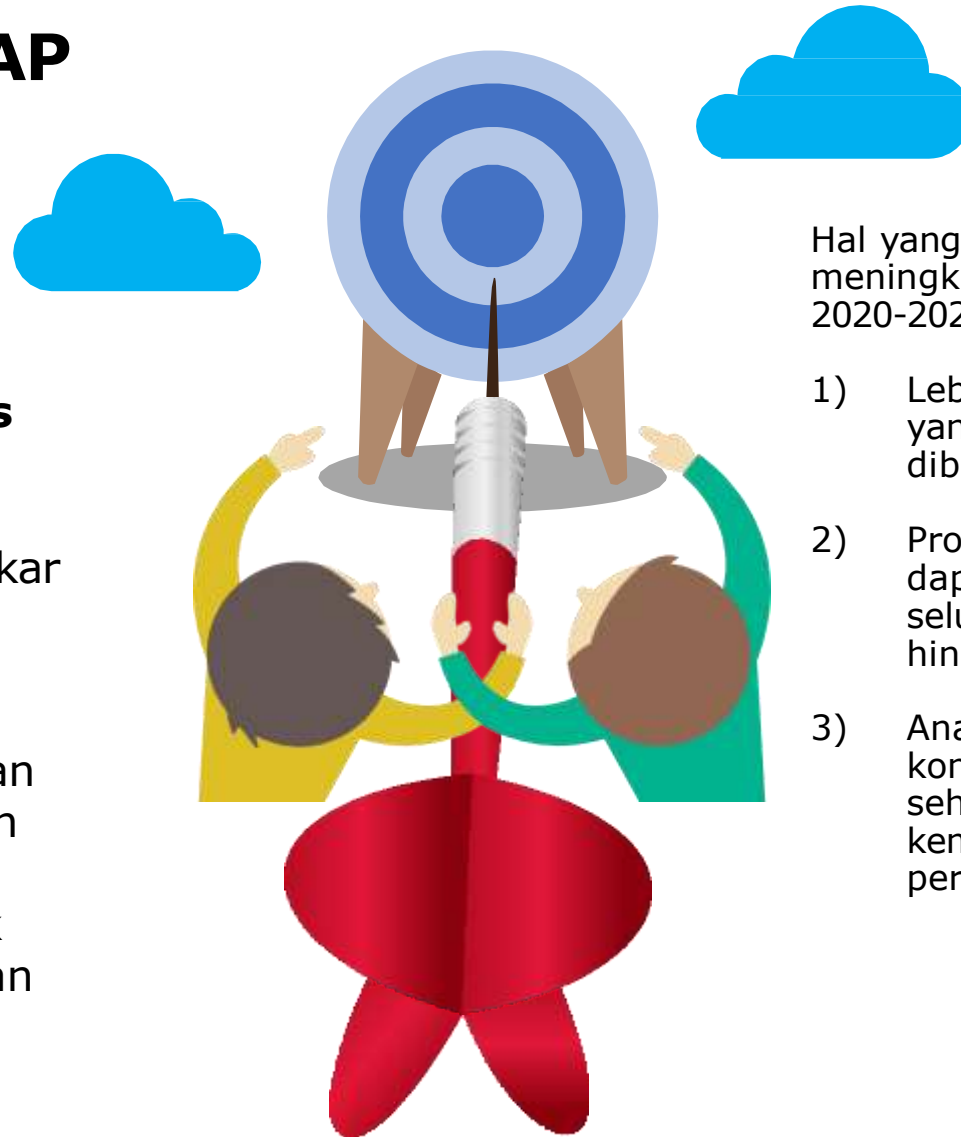
ISU KONDISI BIROKRASI KEMENTAN SEBUAH CATATAN EVALUASI RB 2019



KEBIJAKAN NASIONAL ROAD MAP RB 2020-2024

Mengedepankan 2 (dua) asas utama yaitu **Fokus dan Prioritas**

- 1) Fokus :upaya RB akan dilakukan berfokus pada akar permasalahan tata Kelola pemerintahan.
- 2) Prioritas :setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata Kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

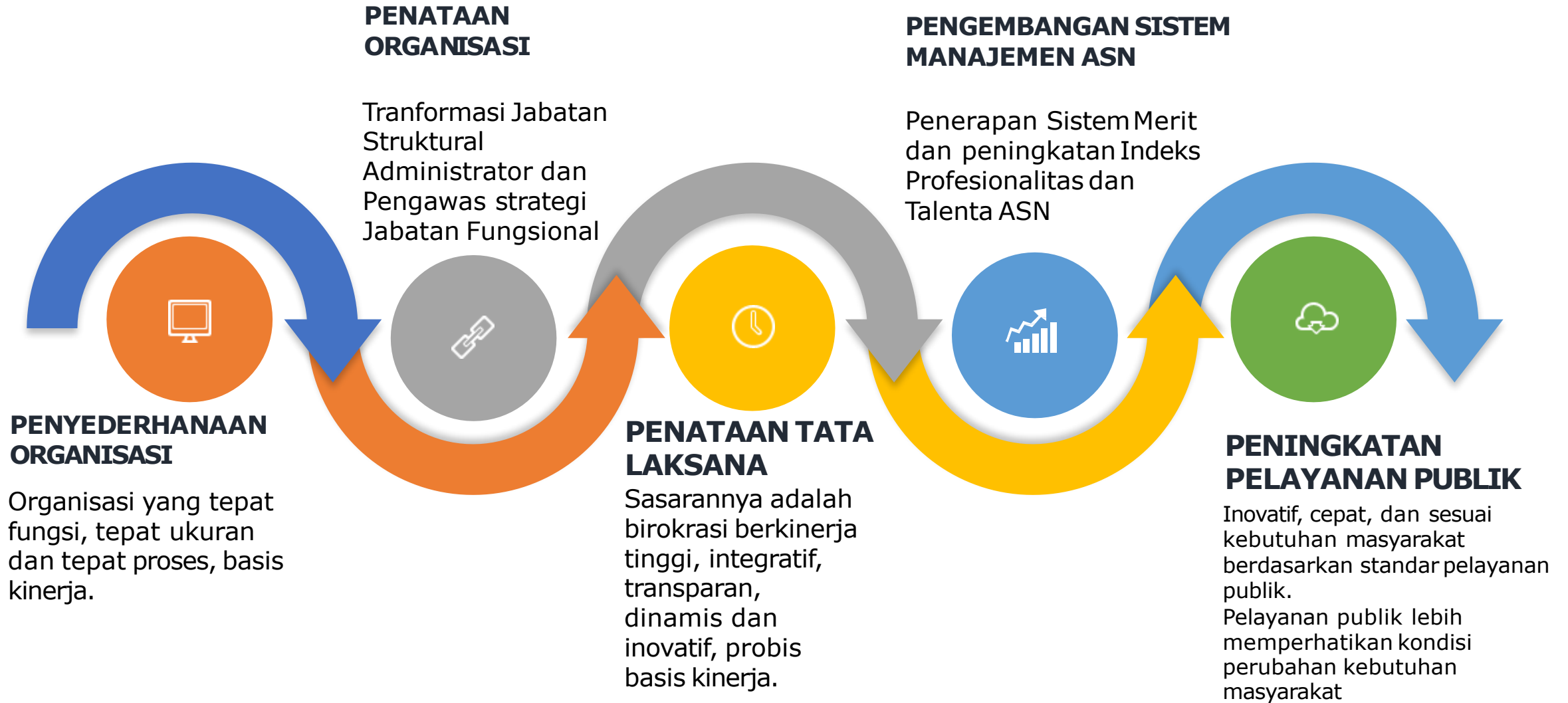


Hal yang diperbaharui guna meningkatkan kualitas road map RB 2020-2024:

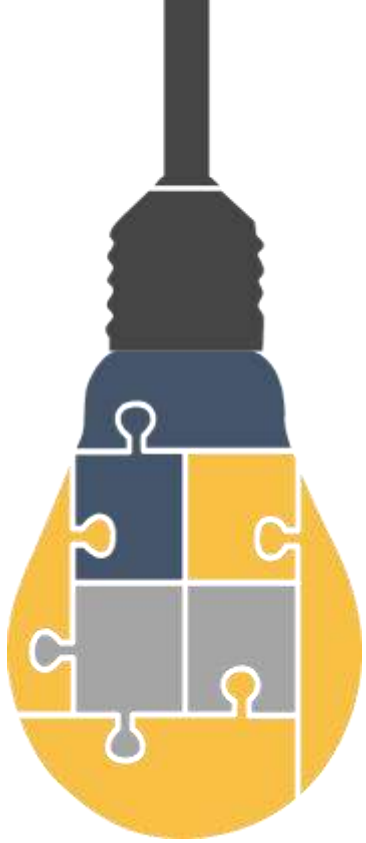
- 1) Lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas.
- 2) Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja, mulai dari pusat hingga yang berada di daerah (UPT).
- 3) Analisi dilakukan secara holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan RB yang lebih utuh.



KEBIJAKAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI 2020-2024



SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024



1

BIROKRASI YANG
BERSIH DAN
AKUNTABEL

2

BIROKRASI YANG
KAPABEL

3

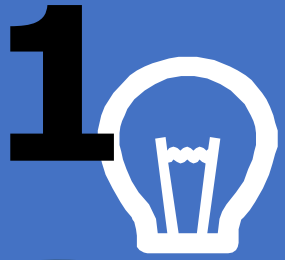
PELAYANAN
PUBLIK PRIMA
BERKUALITAS

- DEREGULASI
- AKUNTABILITAS
- PENGAWASAN

- Manajemen Perubahan
- Deregulasi
- Organisasi
- Tatalaksana
- SDM Aparatur

- PELAYANAN
PUBLIK

Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024



REFORM MINDSET CULTURE SET

Manajemen perubahan diharapkan mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja, secara sistematis dan konsisten, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi



DEREGULASI

Organisasi semakin dituntut untuk menjadi adaptif terhadap kebutuhan strategis nasional, membuka seluas-luasnya investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian, serta menghilangkan semua hambatan terhadap investasi bidang pertanian



TRANSFORMASI ORGANISASI

Perubahan dalam Area Penataan Kelembagaan dapat dilihat dari struktur organisasi ramping dan *flat* (tidak banyak jenjang hirarki dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan profesional atau fungsional daripada jabatan administrasi)



REFOM SDM

Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur telah dilakukan melalui kegiatan analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, penetapan sasaran kinerja pegawai, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, penegakan disiplin, penerapan pola karir/sistem merit, dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi



REFOM DIGITAL

Program penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target tata laksana dalam agenda reformasi birokrasi adalah:

- meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen;
- meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen; dan
- meningkatnya kinerja organisasi maupun individual.

Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024



Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024

9 QUICKWINS

Quick Wins Unit Kerja

- Di Lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan *Quick Wins* Unit Kerja untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- Seluruh Unit Kerja *Quick Wins* mempunyai karakteristik yang berbeda yang mencerminkan keberagaman jenis pelayanan.



Quick Wins Mandatory

Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Win* Instansi pemerintah.



FOKUS PADA HASIL REFORMASI



Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan **Program percepatan** dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Quick Wins Program

- Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, ditetapkan *Quick Wins* Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- Keberhasilan *Quick Wins* ini sebagai pelaksanaan dan pencapaian sasaran tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon I.



MANAJAMEN TATAKELOLA RB PUSAT KEMENTAN

TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTAN



MENTERI PERTANIAN

Mengarahkan Kebijakan Reformasi Kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Dalam Tatakelola Pemerintah yang Baik.



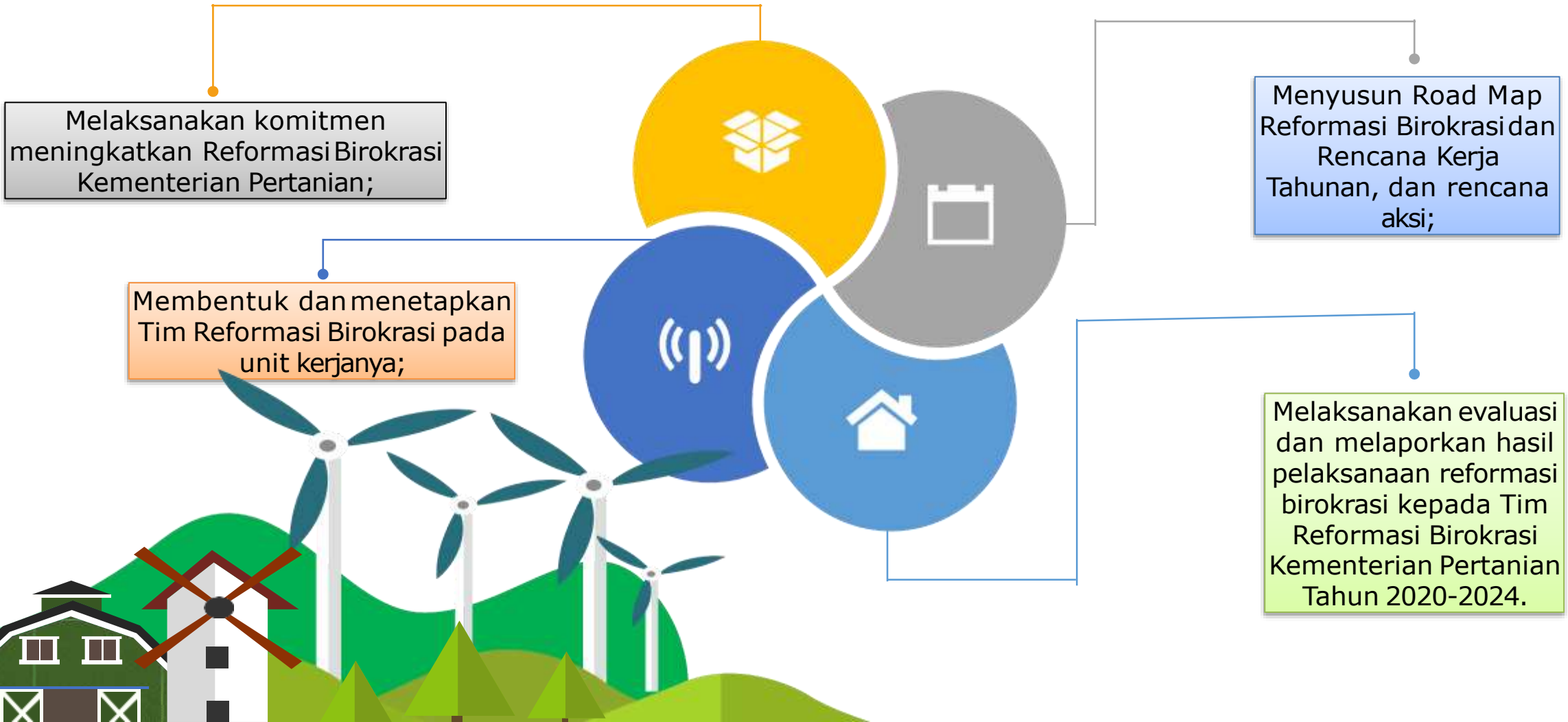
KETUA TIM REFORM SEKRETARIAT JENDERAL

- merumuskan dan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- melaksanakan konsultasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
- melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai, stakeholder dan masyarakat;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- melaksanakan supervisi kepada Tim RB Unit Kerja Eselon I serta melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan RB
- menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

MANAJEMEN TATAKELOLA RB PUSAT ES. I KEMENTAN

TUGAS TIM UNIT KERJA ESELON I

Berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerjanya



MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN

Kegiatan *monitoring* dilakukan secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan dan unit kerja eselon I dan UPT, dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut:

- Dokumentasi
- Survei
- Observasi lapangan
- Wawancara
- Campuran
- Webinar
- Zoom



MONITORING

EVALUASI



Tim Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala. Evaluasi dilakukan berdasarkan rencana aksi masing-masing area perubahan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab melalui rapat kerja teknis Tim Reformasi Birokrasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi juga mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



PELAPORAN

Tim Reformasi Birokrasi menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian berdasarkan laporan dari masing-masing area perubahan, unit kerja eselon I, dan UPT yang disampaikan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal.





Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kementerian Pertanian
REPUBLIK INDONESIA

THINK
AHEAD

(BERPIKIR KEDEPAN)

THINK
AGAIN

(MENGAJI ULANG
CARA BERPIKIR)

THINK
ACROSS

(BERPIKIR LATERAL,
HORIZONTAL, LINTAS
DISIPLIN)



- Reformasi Birokrasi dimulai dari pegawai yang mau merubah pola pikir dan budaya kerja sesuai tujuan organisasi.
- Sekecil apapun kontribusi PNS terutama kinerja yang maksimal akan mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
- Keberhasilan pencapaian target reformasi birokrasi merupakan perwujudan peran aktif dari seluruh PNS Kementerian Pertanian.